



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : AHMAD CHOIRUDIN
- Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD)  
MUDA
- NHK : 876464

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m<sup>2</sup>/144 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 100.500.000

- MOBIL, SUZUKI KARIMUN ESTILLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
- MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 8.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.500.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 511.000.000

**III. HUTANG** Rp. 20.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 491.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.